DINAMIKA KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BADAN PUBLIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI
Diajukan Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Disusun oleh :
Dedi Hartono
NIM. 08210071

Dosen Pembimbing :
Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M. Si
NIP: 19780717 2009 011012

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1645/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

DINAMIKA KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BADAN PUBLIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: DEDI HARTONO
NIM/Jurusan	: 08210071/KPI
Telah dimunaqasyahkan pada	: Jum'at, 29 Agustus 2014
Nilai Munaqasyah	: 80 (B+)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang/Penguji I,

Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M. Si.
NIP: 19780717 200901 1 012

Penguji II,

Khadiq, S.Ag., M.Hum.
NIP 19700125 199903 1 001

Penguji III,

Dra. Hj. Anisah Indriati, M.Si.
NIP 19661226 199203 2 002.

Yogyakarta, 16 September 2014
Dekan,

Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	:	Dedi Hartono
NIM	:	08210071
Judul Skripsi	:	DINAMIKA KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BADAN PUBLIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

sudah dapat diajukan untuk munaqosyah kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Agustus 2014

Mengetahui
Ketua Jurusan
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.
NIP. 19710328 199703 2 001

Pembimbing

Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M. Si.
NIP: 19780717 2009 011012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Dedi Hartono
NIM	: 08210071
Jurusan	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : "DINAMIKA KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BADAN PUBLIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Agustus 2014

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL 20
98B59ACF307849066
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dedi Hartono
NIM 08210071

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan khusus untuk:

- Orangtuaku tercinta

  Ayahanda Abu Bakar dan Ibunda Nursia
  Terima kasih untuk
  segala curahan kasih sayang yang
  tulus dan ikhlas serta segala
  pengorbanan dan do'a yang tiada henti
  kepada ananda.

- Saudaraku tercinta:

  Uda Daswadi,

  Ayuk Sardiati,

  dan Deden Hidayat.

- Khairun Nisaa Abdillah.

- Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Terakhir khusus untuk DIRI SENDIRI "teruslah bermimpi, karena dengan bermimpi semangatmu akan selalu hidup untuk mewujudkannya".

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?"

Q. S. Ash Shaff, 61 : 2

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".

Q. S. Alam Nasyrah, 94 : 5 - 8

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang terang. Dan atas ridhoNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Dinamika Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta".

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material. Untuk itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Musya Asy'ari.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Waryono, M. Ag.
3. Ketua jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khoiro Ummatin, S. Ag., M.Si.
4. Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas waktu, bimbingan, kritik, dan sarannya selama ini.
5. Khadiq, S.Ag., M.Hum dan Dra. Hj. Anisah Indriati, M.Si selaku penguji munaqasyah, terimakasih banyak atas saran-sarannya.

6. Seluruh dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah tulus dan ikhlas mengajarkan dan membagi semua ilmunya.
7. Ibu Nur Sumiyatun yang dengan tulus melayani segala urusan akademik.
8. Bapak dan Ibuku yang telah banyak berkorban, jasa-jasa dan kasih sayangmu selama ini takkan mampu ku balas, namun semoga dengan hasil karya ini dapat selalu membuatmu tersenyum.
9. Kakakku Uda Daswadi, Ayuk Sardiati dan Adekku Deden Hidayat.
10. *Dedstroyer* yang selalu memberikan harapan-harapan setiap harinya. Jadilah besar dan kokoh.
11. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, tanpa kalian semua aku tidak bisa sampai disini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2014

Penulis

ABSTRAKSI

Penelitian ini berlandaskan pada persoalan bahwa partai politik Islam saat ini mengisyaratkan ada persoalan mendasar, yaitu secara sosiologis politik adanya ketertutupan partai politik islam dalam pengelolaan manajemen secara kelembagaan. Ditambah lagi, dengan pola komunikasi, dalam konteks keterbukaan informasi, yang digunakan kurang mengakomodir hak publik dalam mengakses informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan dinamika komunikasi dan keterbukaan informasi dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan secara metodologis, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan ragam/tipe studi kasus sebagai konsekuensi dari tujuan penelitian, yaitu mengembangkan deskripsi dan eksplanasi yang mendalam mengenai dinamika komunikasi politik PKS dalam ranah politik Indonesia serta keterbukaan informasi di organisasi ini.

Dari penelitian yang dilakukan, didapat kesimpulan bahwa dinamika komunikasi yang digunakan DPW PKS DIY terdapat dua macam, yaitu: *pertama*, media komunikasi massa; dan *kedua*, media komunikasi interpersonal. Media komunikasi massa yang digunakan secara umum ada dua bentuk media massa yaitu: komunikasi tatap muka (*face to face*), dan; media komunikasi berperantara. Sementara, media komunikasi berperantara terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: media visual, media audio dan media audio visual. Sedangkan dalam konteks keterbukaan informasi, media yang digunakan DPW PKS Yogyakarta adalah *twitter*, *facebook* dan *website* cenderung bersifat formalitas seiring adanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebab, dari poin-poin yang merupakan kewajiban partai politik sebagai badan publik, pendanaan partai masih menjadi persoalan utama, yakni tidak dapat diakses. Dengan kata lain, DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY tidak kooperatif dengan UU KIP

Kata Kunci: *Dinamika Komunikasi, Keterbukaan Informasi, Partai Politik, dan Badan Publik*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERSUTUJUAN SKRIPSI..... iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAKSI ix
DAFTAR ISI..... x
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Penegasan Judul..... 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Rumusan Masalah..... 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Kerangka Teori 8
1. Tinjauan Tentang Dinamika Komunikasi 8
2. Tinjauan Tentang Keterbukaan Informasi..... 13
G. Kerangka Pikir 19
H. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan..... 20
I. Metodologi Penelitian..... 23
J. Sistematika Pembahasan..... 29
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG DPW PKS DIY DAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 31
A. Profil DPW PKS DIY 31
1. Logo 38
2. Landasan Filosofis..... 39
3. Karakteristik 40
4. Prinsip Dasar 44
5. Vivi Misi 45
6. Keanggotaan..... 49

7. Struktur Kepengurusan PKS DIY 50
8. Anggota PKS di DPW DIY 51
9. Sekertariat/Lokasi PKS DPW DIY 52
B. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)..... 52
1. Konsep Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)..... 52
2. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)..... 55
3. Hak dan Kewajiban Badan Publik 59
4. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik..... 61
BAB III: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN DINAMIKA KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PARTAI POLITIK PKS DIY 63
A. Sajian Data 63
1. Dinamika Komunikasi Partai Politik PKS DIY 63
2. Keterbukaan Informasi Partai Politik PKS DIY Sebagai Badan Publik 96
B. Hasil Analisis dan Pembahasan 103
1. Dinamika Komunikasi DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta 103
2. Keterbukaan Informasi DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta 108
BAB IV: PENUTUP..... 114
A. Kesimpulan 114
B. Saran-saran..... 119
C. Penutup
DAFTAR PUSTAKA 120
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Dinamika Komunikasi

Menurut KBBI, dinamika berarti gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun melalui media.[1] Adapun menurut Cherry, istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari bahasa latin *Communico* yang artinya membagi.[2] Jadi, dinamika komuniasi adalah kegiatan berkomunikasi, baik komunkasi interpersonal, dengan berbagai media, effek dan lain-lain.

2. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi adalah kesediaan suatu instansi atau organisasi untuk memberikan akses informasi terbukan dan efisien kepada publik. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan bertanggung jawab. Di dalamnya terkandung adanya hak untuk

[1] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya,2006), hlm. 5

[2] Hafied H Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran, kebebasan berekspresi yang terwujud melalui implementasi kebebasan pers, serta adanya mekanisme hukum mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas dilanggar.

3. PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999. Partai ini didirikan terkait aktivitas dakwah Islam yang sudah eksis di awal tahun delapan puluhan, dimana mereka berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivits sosial, ekonomi dan pendidikan, meskipun berada di bawah bayang-bayang Orde Baru yang ketat mengawasi aktivitas keagamaan.

4. Badan Publik

Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Jadi yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah dinamika komunikasi dan realitas dari keterbukaan informasi Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah badan publik. Sudahkah sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau justru yang diterapkan selama ini bertentangan.

B. Latar Belakang Masalah

Partai Politik Islam saat ini mengisyaratkan ada persoalan mendasar, walaupun secara hukum tidak nampak, yaitu secara sosiologis politik adanya ketertutupan partai politik islam dalam pengelolaan manajemen secara kelembagaan. Seperti tidak transparannya ketika rekrutmen anggota, berhembusnya *money* politik ketika mengkaderkan anggota sebagai pejabat politik, suara pemilih yang bisa dibeli, tidak optimalnya proses pendidikan politik untuk kader, rendahnya kualitas anggota yang terpilih dalam parlemen, tidak jelasnya ideologi atau platform yang di perjuangkan dan banyak faktor yang tidak dipahami oleh masyarakat tentang seluk beluk partai politik yang menyebabkan rendahnya pula kualitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, kita sudah memiliki Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14/2008 yang mewajibkan partai politik harus transparan sebagai badan publik yang menerima sebagian atau seluruh anggarannya dari negara (APBN/APBD). Namun adanya undang-undang tersebut, tidak membuat partai politik lebih terbuka kepada

masyarakat tentang informasi yang terkait dengan kelembagaannya. Disamping, tidak berjalannya relasi antara partai politik dengan para konstituennya secara memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Terlebih lazimnya komunikasi yang dijalankan partai politik saat ini banyak yang bersifat "*hit* dan *run*", hanya berlangsung sesaat, sporadis dan bahkan ada yang nyaris berlangsung pada saat pemilihan Umum saja.

Program pembangunan selama ini yang ditujukan ke partai politik belum dapat melepaskan dari independensi, perjuangan untuk rakyat, serta konsistensi dengan platform yang dimiliki. Umumnya partai politik saat ini berkerja memiliki beban lebih berat karena tuntutan masyarakat yang lebih tinggi, persaingan yang tidak sehat antar partai politik serta orientasi sistem politik yang belum mapan. Studi-studi terhadap partai politik dalam pembangunan sistem politik yang lebih sehat mengisyaratkan persoalan mendasar sebagai berikut: **pertama**, dari sisi normatif tidak adanya persoalan menyangkut peran partai politik. Negara dan pemerintah tidak memandang peran dan kedudukan partai politik sebagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Sebagai lembaga publik tentu harus jelas visi, misi dan ideologi serta berbagai ketentuan yang terkait dengan sistem politik di Indonesia.

Kedua, adanya persoalan sosiologis-politis di masyarakat. Persoalan partai politik yang terkait sosiologis politis sangat kompleks, diantaranya: 1) adanya kepentingan pragmatis partai politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan finansial, 2) kualitas dan kompetensi pengurus partai

politik yang rendah, 3) tingkat kemandirian lembaga partai politik yang rendah serta 4) peran dan kedudukan partai politik yang rendah dalam sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih berkualitas.

Ketiga, pemerintah telah menggariskan kebijakan kerja sama dengan lembaga non pemerintah dengan upaya peningkatan kualitas partai politik islam di Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu indikator proses desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. **Keempat**, terdapat asumsi kolektif bahwa peningkatan kualitas partai politik akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

Hingga saat ini persoalan transparansi dan akuntabilitas dana politik masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia. Pada hakekatnya partai politik adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang dapat menjadi elemen penghubung adalah partai yang memiliki komitmen untuk melakukan reformasi internal partai. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. Implementasi dari kedua prinsip ini akan memudahkan publik untuk melakukan proses pemilihan dengan informasi yang selengkap-lengkapnya.

Reformasi internal partai sangat penting untuk mendorong supaya partai dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seyogyanya dimulai dari partai itu sendiri, sehingga pada saat terpilih untuk berkuasa dapat memenuhi aspirasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara total tanpa beban sejarah.

Disahkanya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memberikan angin segar bagi publik dalam keterpenuhan hak atas informsi. Melalui undang-undang ini diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi akses publik terhadap pendanaan politik. Keterbukaan informasi adalah suatu kondisi untuk memungkinkan demokrasi berfungsi dengan baik. Tidak ada demokrasi apapun predikat dan jenisnya tanpa partisipasi politik rakyat. Tidak akan ada partisipasi rakyat tanpa transparansi, keterbukaan politik dan keterbukaan informasi. Untuk itulah Transparency International Indonesia bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat dalam mengembangkan satu instrumen yang dapat mengetahui tingkat transparansi keuangan partai politik.

Namun demikian, berdasarkan pada hasil pemeringkatan yang dilakukan mulai tanggal 7 Oktober 2013 sampai 4 Desember 2013 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap badan publik, ternyata Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sama-sama mendapat

peringkat tertinggi sebagai badan publik yang paling terbuka perihal pemberian informasi publik. Sedangkan untuk kategori parpol nasional, tidak terdapat nominasi, sebab hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengembalikan kuesioner dari tim penilai KIP. Oleh karena itu, KIP memberikan apresiasi dan nilai yaitu 25,923.[3]

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih jauh terkait bagaimana dinamika komunikasi yang dijalankan dan sejauh mana keterbukaan informasi dalam internal salah satu partai politik di DIY (dalam konteks ini adalah PKS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka persoalan yang ingin dicari jawabannya adalah Bagaimana Dinamika Komunikasi dan Keterbukaan Informasi dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Badan Publik di Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan dinamika komunikasi dan keterbukaan informasi DPW Partai Keadilan Sejahtera sebagai badan publik di Kota Yogyakarta.

[3] "Daftar Peringkat KIP: Kemkeu dan PLN, Badan Publik Paling Transparan", dalam http://www.beritasatu.com/politik/155321-daftar-peringkat-kip-kemkeu-dan-pln-badan-publik-paling-transparan.html -->, diunduh pada tanggal 20/12/2013.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini digunakan sebagai pembuktian teori yang sudah didapat dalam proses pembelajaran dan praktik langsung dimasyarakat. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah ilmu tentang dinamika komunikasi dan keterbukaan informasi partai keadilan sejahtera sebagai badan publik

2. Manfaat Praktis

   Sebagai masukan dan pengetahuan kader PKS bagaimana menjalankan strategi komunikasi dan keterbukaan informasi partai dengan memperhatikan kelayakan informasi yang akan disampaikan.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Dinamika Komunikasi

a. Definisi Dinamika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinamika berarti "gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat." Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer dinamika adalah kegiatan; keadaan gerak/giat/derap.[4] Jadi, dari definisi tersebut dapat

[4] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 112.

dipahami bahwa dinamika adalah suatu kegiatan yang dilakukan dari dalam.

b. Definisi Komunikasi

Komunikasi adalah kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia.[5] Ada banyak pengertian yang dapat menggambarkan mengenai komunikasi, berikut ini beberapa di antaranya.

Istilah komunikasi mengandung makna "bersama-sama" *(common,commones)* yang berasal dari bahasa Inggris. Asal istilah komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa Latin yaitu *communication*, yang berarti pemberitahuan, pemberi bagian (dalam sesuatu), pertukaran dimana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengaranya; untuk ikut ambil bagian.[6]

Adapun menurut Cherry, istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari bahasa latin *communico* yang artinya membagi.[7]

---

[5] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat*, hlm. 8

[6] Alo Liliweri, *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 1

[7] Hafied H Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hlm. 18

c. Dinamika Komunikasi

Untuk memahami pengertian dinamika komunikasi tersebut dijelaskan secara efektif oleh Effendy bahwa para ahli komunikasi sering mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyannya *The Structure and Function of Communication in Society*. Harold Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan dinamika komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *who, says what, in which channel, to whom, with what effect* (Siapa, Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa, Dengan Efek Apa).

1. *Who*, yakni berkenaan dengan siapa yang mengatakan
2. *Says what*, yakni berkenaan dengan menyatakan apa
3. *In which channel*, yakni berkenaan dengan saluran apa
4. *To whom*, yakni berkenaan dengan ditujukan kepada siapa
5. *With what effect*, yakni berkenaan dengan pengaruh apa.[8]

Berdasarkan formula Lasswell tersebut, maka terdapat lima komponen komunikasi agar dapat terjadi proses komunikasi, yaitu:

1. Komunikator
2. Pesan

[8] Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 17.

3. Media
4. Komunikan
5. Pengaruh

Jadi, berdasarkan paradigma Laswell, secara sederhana proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu.

Adapun fungsi komunikasi menurut Lasswell adalah sebagai berikut:

a. *The surveillance of the enviroment* (pengamatan lingkungan)
b. *The correlation of the parts of society in responding to the environment* (korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan)
c. *The transmissinon of the social heritage from one generation to the next* (transmisi warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain)

Yang dimaksud dengan *surveillance* oleh Lasswell adalah kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa-peristiwa dalam suatu lingkungan, contohnya seperti menggarap sebuah berita. Kegiatan yang disebut *correlation* adalah interpretasi terhadap informasi mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan. Kegiatan *transmission of culture* difokuskan kepada kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai, dan norma sosial

dari generasi yang satu ke generasi yang lain atau dari anggota suatu kelompok kepada pendatang baru. Ini sama dengan kegiatan pendidikan.

d. Hambatan Komunikasi

Menurut Onong Uchajana Effendy dalam buku yang berjudul "Dinamika Komunikasi", faktor-faktor penghambatn komunikasi adalah:[9]

1. Hambatan sosio-antro-psikologis

Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional (*situational context*). Karenanya, berkomunikasi dalam *Gemeinschaft* dengan istri atau anak tidak akan menjumpai hambatan karena sifatnya personal atau pribadi sehingga dapat dilakukan dengan santai; beda halnya dengan komunikasi dalam *Gesellschaft* (hambatan sosiologis). Manusia meskipun satu sama lain sama dalam jenisnya sebagai makhluk "homosapien", tetapi ditakdirkan beda dalam banyak hal (hambatan antropologis). Begitu pula, komunikasi sulit berhasil apabila komunikan sedang sedih, marah, kecewa, merasa iri hati dan lain sebagainya (hambatan psikologis).

2. Hambatan semantis

Demi kelancaran komunikasinya seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantis ini, sebab

[9] *Ibid.,* hlm. 11

salah ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian atau salah tafsir, yang pada gilirannya bis menimbulkan salah komunikasi.

3. Hambatan mekanis

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang digunakan dalam melancarkan komunikasi. Banyak contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, seperti suara telpon yang krotokan, ketikan huruf yang buram pada surat, berita sura kabar yang sulit dicari sambungan kolomnya dan lain sebagainya.

Menurut Onong Uchajana Effendy dalam bukunya "Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi", ada beberapa hal yang merupakan hambatan komunikasi yang harus menjadi perhatian bagi komunikator bila ingin komunikasinya sukses, yaitu sebagai berikut :

a) Gangguan.
b) Kepentingan.
c) Motivasi terpendam.
d) Prasangka

2. **Tinjauan Tentang Keterbukaan Informasi**

Keterbukaan informasi adalah ketersediaan kesempatan atau memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tentunya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945. Pada pasal 28F dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengertian Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi sangat diperlukan di era globalisasi di mana dengan kebebasan memperoleh informasi, berarti akan memberi ruang yang cukup bagi publik, untuk dapat mengakses berbagai jenis informasi terutama terkait dalam program yang telah dicanangkan oleh partai politik. Korupsi di suatu partai politik tetap menjadi budaya, dan bahkan semakin menggurita, upaya dengan pembuatan undang-undang pun telah dilakukan, yang memberi implikasi bagi para penyelenggara negara untuk bertindak transparan dan memiliki sistem akuntabilitas yang kuat, partisipatif bagi masyarakat dalam mengawal korupsi ini. Selain itu juga terjadinya penyebarluasan teknologi informasi dan transformasi ilmu pengetahuan di sektor-sektor pendidikan yang akan member dampak positif terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik paling tidak konstruksi hukum yang dapat dicermati dalam UU Korupsi mengklasifikasikan sistem pembuktian menjadi tiga hal yaitu pertama, pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang, dan ketiga, sistem pembuktian konvensional layaknya mengacu pada ketentuan KUHAP bahwa jaksa

penuntut umum secara mandiri dibebankan membuktikan kesalahan terdakwa.

UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14/2008 adalah peraturan perundangan yang merespon tuntutan reformasi dalam membentuk pemerintahan yang efektif atau *good* and *clean goverment*. Secara komprehensif UU KIP telah mengatur kewajiban lembaga publik untuk memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada public. Jadi semua lembaga pelayanan publik diajak untuk semakin transparan dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat dan yang diatur oleh undang-undang. Karena pada dasarnya UU KIP mempunyai tiga sumbu utama yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas publik.

Pada UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14/2008 memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang memiliki tujuan:

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik

dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

Selain itu keterbukaan informasi memberi peluang rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat yang *well informed* akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hak itu didasarkan pada pemikiran dan Pengalaman empirik bahwa: (1) Publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi; (2) Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan- tindakan pemerintah; kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggung jawaban pemerintah; (3) Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik; dan agar bertanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan; (4) Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel; (5) Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada uraian di atas maka penelitian ini mengajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

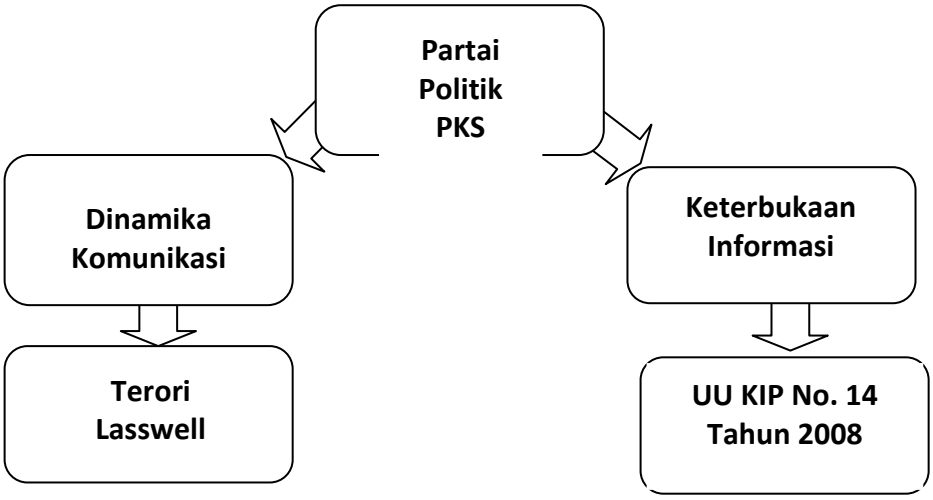

Sebagaimana telah disinggung di atas, Harold Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *who, says what, in which channel, to whom, with what effect* (Siapa, Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa, Dengan Efek Apa).

Sedangkan, Partai dan komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Partai politik dalam menjalankan perannya yakni melakukan pendidikan politik, mengusung kadernya sebagai wakil rakyat dan mengambil hati rakyat tentu memerlukan komunikasi yang efektif dalam memasarkan agendanya tersebut.

Namun begitu, seiring menjalankan agenda internalnya tersebut, partai politik tentu saja tidak bebas nilai. Dalam artian, partai politik sebagai badan publik mempunyai kewajiban dalam memberikan informasi terhadap

publik, baik berkaitan dengan asas partai dan program. Sebagaimana ditagaskan dalam pasal 5 UU KIP bahwa Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik adalah:

1. Asas dan tujuan;
2. Program umum dan kegiatan partai politik;
3. Nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
4. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. Mekanisme pengambilan keputusan partai;
6. Keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Dengan berlandaskan pada dua konsep di atas, penelitian ini akan disusun sehingga nantinya akan diketahui tingkat keterbukaan informasi PKS sebagai sebuah lembaga publik.

H. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Budiman "Strategi Komunikasi Partai Politik Pada Kampanye Pemilu Legislatif 2009 di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara". Dari hasil penelitian di

dapatkan bahwa Golkar, PDIP dan PDS tidak siap untuk menyusun strategi komunikasi partai yang benar-benar berorientasi kepada persolan riil di masyarakat dan perlu dikomunikasikan caleg kepada masyarakat pemilihnya. Ketiganya hanya mengangkat keberhasilan partai baik di lembaga legislatif maupun eksekutif pada masa sebelumnya, serta isu-isu umum seperti sembako murah, pendidikan gratis dan sebagainya sebagai substansi pokok materi kampanye. Pada penelitian ini meneliti tentang Strategi Komunikasi Partai Politik Pada Kampanye Pemilu Legislatif 2009 sedangkan penelitian di lakukan meneliti tentang dinamika komunikasi dan keterbukaan informasi Partai Keadilan Sejahtera.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifin Wibisono, "Penerapan Portal Mahkamah Agung RI Untuk Mewudukan Keterbukaan Informasi Publik". Skripsi ini membahas mengenai penerapan portal Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma positivis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hasil penerapan portal www.mahkamahagung.go.id dan kaitannya dengan pelaksanaan transparansi dan keterbukaan publik dari Mahkamah Agung RI kepada masyarakat sebagai publiknya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan portal Mahkamah Agung RI belum beralan dengan baik dari

segi bentuk relasi e-goverment dan peningkatan transparansi dan keterbukaan publik.[10]

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Diana Puspa Negara "Strategi Public Relations dalam Partai Keadilan Sejahtera". Penelitian yang dilakukan ada tahun 2008 silam ini menghasilkan kesimpulan bahwa aktivitas *Marketing Public Relation* PKS dilakukan oleh kader dan struktur partai yang keduanya dilakukan dengan melalui dua agenda, yang pertama agenda berkelanjutan, berupa kegiatan layanan untuk masyarakat; kegiatan pembinaan masyarakat, kegiatan pelayanan bidang sosial, kegiatan pelayanan di bidang ekonomi dan kegiatan pelayanan kesehatan, yang dilakukan tidak terkait dengan pemilu. Kedua adalah agenda lima tahunan, dilakukan menjelang pemilu pada saat masa kampanye partai mulai dari *direct marketing*, *event*, atributisasi, media *relations*, PKS mendengar, PKS berbicara, dan d*irect selling.*

Dari ketiga penelitian di atas tidak ada yang fokus penelitiannya terhadap keterbukaan informasi dalam partai politik (termasuk PKS). Dengan demikian penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut sekaligus mengindikasikan keaslian dari penelitian yang penulis susun.

[10] Muhammad Arifin Wibisono, *Penerapan Portal Mahkamah Agung RI Untuk Mewudukan Keterbukaan Informasi Publik,* Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2012), hlm. X.

I. METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Yogyakarta, sekertariat DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yogyakarta. Di Jl. Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta.

2. Objek dan Subyek Penelitian

Yang merupakan objek penelitian dalam penelitian ini adalah keterbukaan informasi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi subyek penelitian adalah DPW Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan ragam/tipe studi kasus sebagai konsekuensi dari tujuan penelitian, yaitu mengembangkan deskripsi dan eksplanasi yang mendalam mengenai dinamika komunikasi PKS dalam ranah politik Indonesia dan keterbukaan informasi di organisasi ini. Dengan demikian peneliti berangkat dari asumsi ontologis bahwa realitas yang ada bersifat subjektif dan beragam sebagaimana yang dipahami oleh setiap informan, di mana kebenaran/pengetahuan adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Sebagai sebuah studi yang induktif, penelitian ini tidak meneliti sejumlah ciri atau opini untuk menguji hubungan antar sejumlah variabel yang sudah didefinisikan

sebelumnya, melainkan berusaha untuk menggambarkan subjek penelitian secara rinci dan akurat.

4. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada pendekatan di atas, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana peneltian ini hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dalam metode ini hanya bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya peristiwa yang dialami atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan suatu hubungan dan tidak menguji hipotesis ataupun memuat prediksi.[11]

5. Sumber data

Data dalam penelitian ini akan disajikan dari berbagai macam sumber, yakni:

a. Narasumber (informan)

Dalam penelitian kualitatif posisis nara sumber sangat penting, bukan skedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan

[11] Jalaluddin Rahmat, *Metode Komunikasi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya , 2001), hlm, 24.

informasi yang diberikan. Informan yang dimaksud adalah kader, aktivis partai, dan pengurus partai PKS.

b. Peristiwa Atau Aktivitas

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Denganmengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan *cross check* terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang diteliti.

c. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Dokumen yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan komunikasi dan keterbukaan informasi di DPW PKS.

6. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling,* karena teknik pengambilan sampel tersebut dengan mudah dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan

kata lain unit sampel yang diambil disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan atau narasumber yang memenuhi kualifikasi, diantaranya: Ketua DPW PKS Yogyakarta, dan Informan lain yang mengetahui dan mengalami langsung terkait keterbukaan informasi baik dari kader PKS itu sendiri maupun simpatisan yang menjadikan target/sasaran.

7. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan dua cara:

a. Wawancara mendalam (*Indept interviewing*)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau ahli yang berwenang dalam suatu masalah (termasuk akademisi dan tokoh masyarakat). Informan dalam penelitian ini adalah pengurus DPW PKS DIY sebanyak 4 orang. Pengambilan empat orang yang mewakili dari pengurus dan kader dari DPW PKS DIY.

b. Observasi

Sebagai alat pengumpulan data, observasi merupakan langkah yang langsung akan memberikan sumbangan yang sanagat penting dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Sehingga observasi dapat disimpulkan menjadi sebuah pengamatan dan pencatan yang sistematis terhadap gejala-gejala

yang diteliti.[12] Hal-hal yang diobservasi yaitu berkaitan dengan komunikasi dan keterbukaan informasi PKS.

c. Studi Dokumentasi dan Arsip

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

8. Validasi Data

Peneliti melakukan enam dari delapan alternatif strategi validasi yang lazim digunakan, yaitu: (1) triangulasi sumber data, melibatkan kelompok informan yang posisinya "berseberangan" satu sama lain; (2) *peer review* melalui *peer debriefing sessions*, di mana terdapat *"devil's advocate"*; (3) klarifikasi sejak dini tentang posisi peneliti sebagai aktivis partai PKS sehingga kemungkinan-kemungkinan bisa dapat lebih mudah dikendalikan dan diwaspadai oleh pihak-pihak yang mengikuti proses penelitian ini dan membaca hasilnya; (4) mengumpanbalikkan data, analisis, penafsiran, dan kesimpulan sementara kepada beberapa informan, (5) *thick description* yang menggambarkan berbagai proses dan *setting* yang terkait dengan subjek penelitian, sehingga memungkinkan pembaca mempertimbangkan sejauh mana temuan-temuan penelitian ini dapat digeneralisasikan

9. Analisis data

[12] Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 52.

Analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematik dari semua data dan bahan yang telah terkumpul. Sehingga peneliti mengerti benar makna yang telah dikemukakan, dan dapat menyajikan kepada orang lain secara jelas.[13] Karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, maka analisis data juga bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, hasilnya diedit dan dianalaisis dengan menggunakan deskrptif interpretatif.

Untuk dapat menyajikan data yang telah terkumpul dan masih berserakan menjadi suatu bentuk laporan utuh, yang menarik dan bermakna secara runtut dan logis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:[14]

1. Pengumpulan Data

   Peneliti memeriksa hubungan semua data yang diperoleh, apakah sudah lengkap atau ada informasi tambahan yang diperlukan. Juga dapat digunkan untuk mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh.

2. Reduksi Data

   Reduksi data sebagai suatu proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang terus menerus selama proyek berorientasi

[13] Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Pres, 1990), hlm.70

[14] Miles MB dan AM Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1994), hlm. 20

kualitatif berlangsung. Maka, informasi yang tidak diperlukan dibuang atau direduksi agar tidak mengganggu proses analisis.

3. Penyajian Data

   Data yang direduksi, ditampilkan atau disajikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan dari penarikan kesimpulan dalam bentuk tertentu atau dalam suatu data telah terorganisasi.

4. Kesimpulan

   Kesimpulan merupakan hasil akhir dalam penelitian kualitatif. Dalam tahap ini peneliti berusaha menginterprestasikan dan memberikan makna yang penuh dari data yang terkumpul.

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada pokok pemikiran, maka penyusun sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. BAB I, merupakan pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka pikir, hasil penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB II, berupa gambaran umum tentang DPW PKS Daerah Istimewa Yogyakarta dan UU tentang keterbukaan informasi yang akan

menerangkan tentang profil DPW PKS DIY dan UU keterbukaan informasi publik .

3. Bab III**,** menganalisis dan membahas data tentang dinamika komunikasi dan keterbukaan informasi partai PKS Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bab IV**,** adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan penelitian, saran-saran dan kata penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah dinamika komunikasi dan keterbukaan informasi Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW PKS DIY) sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika Komunikasi DPW PKS DIY

   Teknik dan bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya fokus pada satu model namun sangat variatif. DPW PKS DIY bisa dikatakan hampir semua model dan teknik digunakan.

   Bentuk media komunikasi yang digunakan terdapat dua macam, yaitu: *pertama*, media komunikasi massa; dan *kedua*, media komunikasi interpersonal. Media komunikasi massa yang digunakan secara umum ada dua bentuk media massa oleh partai keadilan sejahtera yaitu: media komunikasi dengan tatap muka (*face to face*), dan; media komunikasi dengan perantara. Sementara media komunikasi berperantara terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: media visual, media audio dan media audio visual.

   Begitu pula PKS DIY menggunakan semua bentuk media tersebut pada saat kampanye ataupun sosialisasi. Pada kondisi ini yang digunakan adalah media: visual, yaitu Atribut partai, Leaflet, Surat terbuka, Surat kabar dan Spanduk; Media audio; Media audio visual, dan; Multimedia.

Kedua, media komunikasi interpersonal. Media komunikasi antarpribadi (interpersonal) adalah: *dirrect selling* dan aksi sosial. Yang dimaksud dengan saluran komunikasi pertama adalah *door to door*. Media ini dinilai cukup efektif dalam pembentukan opini publik dan persuasi politik dibanding dengan media lainnya. Sedangkan model komunikasi yang kedua seperti pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosial atau pemberian hadiah.

Sedangkan pada tataran praktis, komunikasi politik PKS DIY diimplementasikan ke dalam beberapa teknik persuasi yaitu propaganda, retorika dan periklanan. Propaganda politik yang khas dilakukan oleh PKS adalah ketika perekrutan kader. Seperti halnya training kader dilakukan sebagai upaya untuk memperkokoh sumber daya manusia dengan target pada pencapaian dan peningkatan kader profesional. Retorika yang gunakan adalah berbentuk *dirrect selling* dan kampanye akbar. Sedangkan periklanan politik DPW PKS DIY biasanya dilakukan ketika akan melaksanakan berbagai program-program politik partai, seperti sejuta leaflet, rontekisasi yogyakarta dan tebar 250 Ribu Kaos. bahwa teknik dan bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya fokus pada satu model namun sangat variatif. DPW PKS DIY bisa dikatakan hampir semua model dan teknik digunakan.

Bentuk media komunikasi yang digunakan terdapat dua macam, yaitu: *pertama*, media komunikasi massa; dan *kedua*, media komunikasi

interpersonal. Media komunikasi massa yang digunakan secara umum ada dua bentuk media massa oleh partai keadilan sejahtera yaitu: media komunikasi dengan tatap muka (*face to face*), dan; media komunikasi dengan perantara. Sementara media komunikasi berperantara terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: media visual, media audio dan media audio visual.

Begitu pula dengan PKS DIY yang menggunakan semua bentuk media tersebut pada saat kampanye ataupun sosialisasi. Pada kondisi ini yang digunakan adalah media: visual, yaitu Atribut partai, Leaflet, Surat terbuka, Surat kabar dan Spanduk; Media audio; Media audio visual, dan; Multimedia.

Kedua, media komunikasi interpersonal. Media komunikasi antarpribadi (interpersonal) adalah: dirrect selling dan aksi sosial. Yang dimaksud dengan saluran komunikasi pertama adalah *door to door*. Media ini dinilai cukup efektif dalam pembentukan opini publik dan persuasi politik dibanding dengan media lainnya. Sedangkan model komunikasi yang kedua seperti pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosial atau pemberian hadiah.

Sedangkan pada tataran praktis, komunikasi politik PKS DIY diimplementasikan ke dalam beberapa teknik persuasi yaitu propaganda, retorika dan periklanan. Propaganda politik yang khas dilakukan oleh PKS adalah ketika perekrutan kader. Seperti halnya training kader dilakukan sebagai upaya untuk memperkokoh sumber daya manusia dengan target pada pencapaian dan peningkatan kader profesional. Retorika yang gunakan

adalah berbentuk *dirrect selling* dan kampanye akbar. Sedangkan periklanan politik DPW PKS DIY biasanya dilakukan ketika akan melaksanakan berbagai program-program politik partai, seperti sejuta leaflet, rontekisasi yogyakarta dan tebar 250 Ribu Kaos.

2. Keterbukaan Informasi DPW PKS DIY

Dalam hal ini terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu:

a. Media yang Digunakan

Media yang digunakan DPW PKS Yogyakarta adalah *twitter*, *facebook* dan *website*. Meskipun media-media tersebut menurut penulis lebih bersifat formalitas semata karena tidak mengandung pesan yang produktif serta tidak mengakomodir hak publik dalam mendapatkan informasi, terutama terkait program atau kebijakan dan pendanaan. Ditambah lagi *website* yang ada dari mulai peneliti melakukan penelitian hingga selesai tetap tidak bisa diakses

b. Kewajiban Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008 terdapat tujuh poin yang merupakan kewajian partai politik. Ketujuh poin tersebut adalah: asas dan tujuan; program umum dan kegiatan partai politik; nama, alamat dan susunan kepengurusan serta perubahannya; pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, mekanisme pengambilan keputusan partai; hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum, dan; informasi lain yang ditetapkan undang-undang berkaitan dengan partai politik.

Namun demikian, dari kesemua poin tersebut pendanaan partai merupakan sesuatu yang tidak dapat diakses. DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY tidak kooperatif dengan UU KIP sebagaimana dijalaskan pada bab sebelumnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari berbagai uraian pada bab 1, 2 dan 3, maka dapat dikemukakan berbagai saran bagi pendidikan politik PKS dalam aktivitas Keterbukaan Informasi Publik. Saran-saran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam seharusnya menjadikan ajaran Islam sebagai jiwa dalam berpolitik. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap santun, berperilaku adil dan tentu saja tidak menjadikan agama sebagai alat jual beli politik.
2. Sebagai partai yang bersih dan peduli, hendaknya PKS mampu menjadi teladan dan fokus menciptakan kader yang negarawan. Bagaimanapun PKS adalah partai besar sehingga sudah seharusnya bersikap profesional dan menjalankan amanah UU (khususnya UU KIP) di atas kepentingan kelompoknya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan melalui beberapa proses yang harus ditempuh. Walaupun terdapat beberapa kendala, namun peneliti merasa bersyukur semua dapat dilalui dengan pertolongan Allah melalu orang-orang yang selalu setia dalam membantu dan memberikan dukungan, semangat, dan kontribusi pikiran terhadap penulis. Akhirnya saran dan kritik yang membangun selalu dinantikan oleh peneliti sehingga dapat membuat penelitian ini berkembang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Anies Rasyid Baswedan, *"Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory"*, Asian Survey, Vol. 44, No. 5, 669-690, 2004.

Arief Munandar, *Antara Jamaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Desertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Sosiologi, 2011.

Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, Bandung, Rosdakarya, 2001.

Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Gabriel Almond dan G Bingham Powell Jr. *Comparative Politics: A Development Approach*, Boston: Little Brown, 1976.

Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Jalaluddin Rahmat, *Metode Komunikasi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya , 2001.

_____, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

M. Alwi Dahlan, *Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian*, Dalam Jurnal Ilmu Politik No.6, hlm. 3-20, Jakarta: Gramedia, 1990.

Miles MB dan AM Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1994.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982.

Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996

Muhammad Arifin Wibisono, *Penerapan Portal Mahkamah Agung RI Untuk Mewudukan Keterbukaan Informasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2012.

Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993.

R.L Applebaum and Anatol, *Strategies for Persuasive Communication,* Ohio: A Bell & Howell, Co, 1974).

Rush Michael dan Althoff Phillip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Steven B Wolinetz, "Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies", dalam Richard Gunter, José Ramon Montero and Juan J. Linz, *Political Party: Old Concepts and New Challenges*. New York: Oxford University Press, 2002.

Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Pres, 1990.

"Sejarah Ringkas" http://www.pkssumut.or.id/2012/12/sejarah-ringkas.html, diunduh pada tanggal 24/11/2013.

FIELD NOTE WAWANCARA KADER PKS

Informan : Yudha Yuliardi

Tempat Wawancara : Kantor DPW PKS Yogyakarta

Tanggal dan Jam wawancara : 23 Januari 2014, Pk. 10.00 WIB

Yudha Yuliardi atau akrab dipanggil Yudha memutuskan untuk bergabung bersama partai PKS sejak 2008. Awal mula bergabung dengan partai ini saat PKS mengadakan sebuah kegiatan pengajian yang kebetulan dihadiri oleh Yudha. Menurutnya keterbukaan informasi adalah sesuatu yang menjadi hak publik untuk tahu, ia sangat mendukung bahwa partai politik mempunyai kewajiban untuk memberikan akses kepada publik selama itu tidak merugikan partai. Partai PKS sangat mendukung terkait keterbukaan informasi di mana hal tersebut diindikasikan oleh dimilikinya akun twitter, facebook, dan website.“Terkait dengan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PKS tidak pernah menyembunyikan sesuatu, terkait dengan AD ART semua orang dapat melihat bahkan platform PKS dapat dilihat melalui internet.” Imbuhnya kemudian.

Banyak kader yang berinisiatif membuat group dengan media-media tersebut. Berdasarkan pengalaman selama ini media-media tersebut sudah cukup mengakomodir kader. Namun yang menjadi kendala adalah kontributor. Banyak yang sebelumnya tidak mengenal PKS tapi dengan adanya media-media tersebut akhirnya PKS populer di masyarakat. Kalangan menengah ke atas cukup sering mengunjungi website.

Informan	: Wisnu Ardianto
Tempat Wawancara	: Kantor DPW PKS Yogyakarta
Tanggal dan Jam wawancara	: 23 Januari 2014, Pk. 11.00 WIB

Wisnu Ardiato yang akrab disapa Wisnu bergabung dengan PKS sejak 2008. Menurutnya jika ingin melakukan sebuah perbaikan, maka salah satu caranya ialah melalui organisasi. Dari sinilah ia kemudian bergabung dengan PKS. “Partai harus mempublikasikan semua agenda dan program kepada publik karena publik berhak tahu. Terutama tentang hal-hal yang disebutkan dalam UU KIP seperti platform, dan agenda partai.” Jelas lelaki asal Sleman tersebut.

Sekarang bukan lagi zamannya untuk menutup-nutupi segala yang berkaitan dengan hak publik. Siapapun berhak mengakses informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan partai. Partai sangat mendorong untuk transparan, meskipun tentu saja ada beberapa informasi yang tidak bisa dibuka ke publik, semisal strategi pemenangan. Website, Facebok, Twitter adalah sebagai media informasi terkait kegiatan dan sosialisasi partai. PKS merupakan partai yang paling banyak mempunyai blog dan website. Sudah cukup memenuhi. Mengenai respon msyarakat terkait dengan kegiatan dan segala sesuatu informasi yang terjadi pada partai masih sangat relatif, karena semisal PKS menginformasikan hal positif tapi bisa saja masyarakat menanggapinya dengan negatif.

FIELD NOTE WAWANCARA PENGAMAT POLITIK

Informan : Wisnu Prasetya Nugraha, S.I.P

Tempat Wawancara : Ruang Dosen kampus UGM jurusan komunikasi

Tanggal dan Jam wawancara : 25 Februari 2014, Pk. 10.00 WIB

Wisnu Prasetya Nugraha yang akrab dipanggil Wisnu sudah lima tahun menekuni sebagai pengamat politik. Sejauh yang ia amati tingkat transparansi partai politik sangat rendah bahkan tidak terbuka terlebih masalah yang menyangkut laporan keuangan dan selalu menghindar ketika dimintai untuk transparansi terkait laporan keuangan. Wisnu menyatakan "Parpol tidak pernah suka dan rela menyerahkan laporan keuangan." Menurutnya, partai politik menempati urutan terendah terkait ketidakterbukaan informasi dibandingkan dengan badan public yang lainnya. Mengenai dengan partai Islam yang dikonotasikan sebagai partai ekslusif, Wisnu menyatakan tidak dipermasahkan karena kenyataannya tidak ada satupun partai politik yang konsisten saat turun kelapangan.

Saat disinggung tentang Partai Keadilan Sejahtera, Wisnu mengatakan bahwa partai Islam ataupun partai nasionalis tidak berbeda terkait ketidakterbukaannya terhadap informasi. Jika dikaitkan dengan UU KIP terkait amanah PKS dalam menjalankan keterbukaan informasi menurutnya partai keadilan sejahtera belum sepenuhnya terbuka, bahkan partai ini tidak pernah

menginformasikan laporan keuangan baik di website ataupun media-media lain. Padahal menurutnya keterbukan informasi terkait keuangan dan pendanaan dirasa sangat perlu karena merupakan tanggungjawab partai terhadap publik dan hal tersebut dapat memperbaiki bargaining positioning partai yang terkait. Pada dasarnya media sudah baik dalam menginformasikan sesuatu hanya saja penginformasian terkadang kurang akomodatif dan tidak obyektif.

Informan : Drs. I Gusti Ngurah Putra, MA

Tempat Wawancara : Ruang Dosen kampus UGM jurusan komunikasi

Tanggal dan Jam wawancara : 25 Februari 2014, Pk. 10.20 WIB

I Gusti Ngurah Putra atau akrab dipanggil Gusti sudah menjadi pengamat politik sejak zaman reformasi. Menurutnya terkait dengan keterbukaan partai politik terhadap public sampai sekarang masih minim. Ketika disinggung perbadingan dengan badan public yang lain ia menyatakan "Janganlan partai politik, badan public lainnya saja masih tarik ulur." Partai yang berlandaskan Islam cederung pragmatif. Menurutnya sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang melakukan keterbukaan informasi. Ketika dikaitkan dengan UU KIP semua partai politik, tidak terkecuali PKS sampai sekarang tdak menjalankan amanah tentang keterbukaan informasi dengan baik, terutama mengenai sumber pendanaan partai yang tidak jelas alirannya, dan menurutnya sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika suatu partai politik membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai kebutuhannya, mereka rela menghalalkan segala cara. Padahal secara moral partai politik memiliki kewajiban moral terhadap public meskipun UU tidak mampu menekai partai politik untuk dapat lebih transparan.

"Yang seharusnya dilakukan oleh partai politik adalah menginfokan semua agenda kepada publik agar mendapatkan kepercayaan, namun sayangnya apa yang disampaikan hanya dalam tataran normative saja. Hal ini dapat dilihat dari slogan parpol dan bagaimana realitas di lapangan."imbuhnya.